



Rabu, 27 Januari 2021

1. AAJI: Kinerja Bancassurance Sangat Bergantung pada Ekonomi Makro [Bisnis.com](#) / 25-01-2021

FINANSIAL

HOME PERBANKAN **ASURANSI** MULTIFINANCE PERSONAL FINANCE MONETER SYARIAH FINTECH

Home • Finansial • Asuransi

AAJI: Kinerja Bancassurance Sangat Bergantung pada Ekonomi Makro

Bancassurance menghadapi tantangan sulitnya tatap muka untuk melakukan penjualan, sehingga kinerja penjualan cukup terhambat



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
25 Januari 2021 | 21:32 WIB



Karyawan berkomunikasi di dekat logo beberapa perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Selasa (15/1/2020). *Bisnis - Nurul Hidayat*

A⁻ A⁺

Share



Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai bahwa kinerja *bancassurance* pada tahun ini akan sangat bergantung kepada kondisi ekonomi makro yang ditentukan oleh penanganan pandemi virus corona. Dalam skenario terburuk, bisnis *bancassurance* setidaknya akan sama seperti capaian 2020.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menilai bahwa asuransi merupakan kebutuhan tersier bagi masyarakat, sehingga dalam kondisi pandemi tidak menjadi layanan yang paling dicari. Namun, keberadaan *bancassurance* dapat cukup membantu karena banyak masyarakat yang tetap membutuhkan layanan perbankan.

Meskipun begitu, *bancassurance* menghadapi tantangan sulitnya tatap muka untuk melakukan penjualan, sehingga kinerja penjualan cukup terhambat. Perbaikan penanganan pandemi Covid-19 pun dinilai menjadi kunci bagi tumbuhnya pemasaran asuransi, termasuk melalui kanal *bancassurance*.

"Sebenarnya tantangan kanal *bancassurance* itu enggak ketemu orang saja, aktivitasnya berubah jadi bank digital. Memang sudah zaman *online*, iya, tapi jangan lupa asuransi jiwa itu kebutuhan tersier. Jadi, orang kalau punya uang dalam situasi seperti sekarang ini akan disimpan," ujar Togar kepada *Bisnis*, Senin (25/1/2021).

Menurutnya, kondisi pandemi saat ini belum menunjukkan tanda perbaikan, terlihat dari terus bertambahnya catatan kasus positif, tingkat kematian, dan penuh rumah sakit di berbagai wilayah. Meskipun Covid-19 merupakan ancaman kesehatan dan jiwa, masyarakat justru cenderung menyimpan uangnya alih-alih membeli asuransi.

Togar pun menilai bahwa jika kondisi pandemi belum kunjung membaik, penjualan melalui kanal *bancassurance* setidaknya akan berada di posisi yang sama seperti 2020. AAJI mencatat bahwa bisnis *bancassurance* tumbuh 4 persen (*year-on-year*) pada kuartal III/2020.

Kinerja bisnis itu, termasuk industri secara keseluruhan dapat tumbuh lebih baik jika kondisi pandemi Covid-19 menunjukkan sinyal perbaikan. Oleh karena itu, AAJI berharap vaksinasi dapat berjalan dengan optimal dan hasilnya positif, sehingga menghadirkan keamanan bagi masyarakat.

Togar menilai salah satu hal yang dapat dilakukan oleh para pemain *bancassurance* adalah dengan menempatkan produknya di layanan digital perbankan, seperti di aplikasi *mobile banking*. Namun, cara itu pun belum menjamin adanya peningkatan penjualan asuransi.

Menurut Togar, saat ini produk asuransi masih bersifat dijual, bukan dibeli. Hal tersebut membuat penyediaan produk tidak serta merta membuat masyarakat akan belanja proteksi, perlu strategi-strategi khusus agar asuransi itu bisa dibeli oleh khalayak, termasuk para nasabah bank.

"Akibatnya, kalau ditaruh saja begitu [produk asuransi di aplikasi perbankan] jadi enggak bunyi," ujar Togar.

asuransi

aaaji

bancassurance

Editor : Annisa Sulisty Rini

2. URGENSI PAJAK KLAIM ASURANSI
CNBC TV Indonesia / 21-01-2021



| KASUS AJB BUMIPUTERA |

OJK Lanjutkan Pemanggilan Pejabat

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan melanjutkan pemanggilan sejumlah pejabat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atas dugaan tindak pidana mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat kewenangan regulator.

Berdasarkan surat panggilan No. SPGL 19/I/2021/DPJK, Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera, Nurhasanah. Nurhasanah diminta menghadap penyidik OJK Jus Marfinoor dan Tim Kantor OJK Lampung pada Rabu (27/1).

Penyidik Eksekutif Senior OJK, Andries Hermanto menjelaskan dalam surat tersebut bahwa Nurhasanah akan dimintai keterangan se-

bagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Otoritas menilai adanya tindakan mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK.

“Tidak melaksanakan perintah tertulis no. S.13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan 54 Undang-Undang No.11/2011 tentang OJK juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di AJB Bumiputera periode April 2020 sampai dengan Oktober 2020,” tulis Andries dalam salinan surat yang diperoleh *Bisnis*, Selasa (26/1).

Penyidik OJK pun memeriksa salah satu eksekutif Bumiputera di kediamannya pada Selasa (26/1). Namun,

Bisnis belum mendapatkan konfirmasi tentang pemanggilan tersebut dari Nurhasanah, yang diminta hadir di Kantor OJK Provinsi pada Rabu (27/1) pukul 09.30 WIB, dan Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo.

Dalam salinan surat S-13/D.05/2020 tentang Perintah Tertulis, OJK memerintahkan Bumiputera mengimplementasikan Pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera, yakni penyelenggaraan sidang luar biasa dalam hal perseroan mengalami kerugian yang tidak dapat ditutupi dengan dana cadangan umum dan dana jaminan. Surat bertanggal 16 April 2020 tersebut ditujukan kepada RUA, Direksi, dan Dewan Komisaris Bumiputera. (*Wibi Pangestu Pratama*)

4. [Foto] Peluang Peningkatan Permintaan Asuransi
Bisnis Indonesia, hal. 15 / 27-01-2021

■ PELUANG PENINGKATAN PERMINTAAN ASURANSI



Bisnis

Karyawan melintas di depan banner PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia), di Jakarta, belum lama ini. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia menilai bahwa likuiditas perbankan turut meningkatkan permintaan asuransi, khususnya melalui kanal *bancassurance*. Upaya menggaet nasabah perbankan disertai penguatan digitalisasi

menjadi strategi jitu Generali pada tahun ini. CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman menilai bahwa *bancassurance* merupakan salah satu kanal pemasaran asuransi yang sangat prospektif. Perkembangan simpanan dan perputaran dana pihak ketiga di perbankan dinilai perlu dicermati sebagai peluang bagi peningkatan permintaan asuransi.

5. Digitalisasi Jadi Kunci
Bisnis Indonesia, hal. 15 / 27-01-2021

| STRATEGI BANCASSURANCE |

Digitalisasi Jadi Kunci

Bisnis, JAKARTA — Kalangan perusahaan asuransi jiwa mengandalkan digitalisasi untuk mendorong kanal pemasaran lewat perbankan atau *bancassurance* pada tahun ini.

CEO PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, Edy Tuhirman menilai bahwa *bancassurance* merupakan salah satu kanal pemasaran asuransi yang sangat prospektif. Perkembangan simpanan dan perputaran dana pihak ketiga di perbankan dinilai perlu dicermati sebagai peluang bagi peningkatan permintaan asuransi.

Menurut Edy, pihaknya akan memperkuat berbagai kanal pemasaran

untuk menggaet potensi yang ada pada tahun ini, disertai proses digitalisasi. Adanya keharusan *physical distancing* dalam seluruh proses penjualan maupun layanan pascapenjualan membuat digitalisasi menjadi krusial.

"Di masa pandemi ini minat beli asuransi dan kesadaran sosial meningkat. Tingginya risiko juga membuat kanal distribusi digital menjadi pilihan bagi masyarakat," ujarnya saat dihubungi *Bisnis*, Selasa (26/1).

Inovasi tersebut dianggap tepat guna memanfaatkan kesempatan meningkatnya likuiditas perbankan turut meningkatkan permintaan

terhadap asuransi. Saat masyarakat mulai menggerakkan simpanannya menjadi belanja modal, kebutuhan akan proteksi finansial melalui asuransi pun turut meningkat.

Generali Indonesia menyatakan optimis melihat potensi dan proyeksi bisnis pada 2021 karena aktivitas perekonomian yang terus berjalan. Di satu sisi, pandemi Covid-19 pun berdampak terhadap meningkatnya kesadaran dan minat beli asuransi.

Berdasarkan Survei Perbankan Bank Indonesia, DPK pada kuartal I/2021 diproyeksikan melambat menjadi 17,1%. Pertumbuhan DPK deposito yang pada kuartal IV/2020 sebesar

74,2% diproyeksikan berbalik pada kuartal I/2021 menjadi -8,2%.

Dihubungi terpisah, Direktur & Chief Distribution Officer BCA Life Antonius Widodo Mulyono menyatakan bahwa 2020 menjadi tahun yang sangat menantang bagi seluruh sektor bisnis, termasuk asuransi. Menurut Antonius, salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah sulitnya pemasaran secara tatap muka.

"Pencapaian jalur distribusi BCA Life selama 2020 lalu memperlihatkan perlambatan sebesar 22%," ujar Antonius.

Dia berharap bahwa kondisi bisnis BCA Life, termasuk industri asuransi

jiwa membaik pada 2021. Dimulainya vaksinasi dan upaya penanganan penyebaran virus Covid-19 menjadi sentimen positif bagi perekonomian.

Oleh karena itu, entitas bisnis BCA ini akan memaksimalkan pemasaran produk asuransi jiwa tradisional pada untuk menggenjot kinerja. Dia meyakini bahwa perlindungan jiwa yang maksimal sangat dibutuhkan masyarakat saat ini.

"Perekonomian akan mulai bergulir, daya beli masyarakat kembali pulih, dan juga karena pandemi kesadaran masyarakat akan kebutuhan perlindungan jiwa semakin besar," katanya. *(Wibi Pangestu Pratama)*

6. BPJS Ketenagakerjaan Tak Terkait Jiwasraya
Kompas, hal. 7 / 27-01-2021

BPJS Ketenagakerjaan Tak Terkait Jiwasraya

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi dan keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tak berhubungan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). "Apa BPJS Ketenagakerjaan ada kaitannya dengan Jiwasraya? Tidak. BPJS kasusnya berdiri sendiri dan ini masih dalam penyidikan awal," kata Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (26/1/2021). Burhanuddin juga mengatakan, terkait dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya sudah memeriksa 20 orang. Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, penyidik memeriksa sembilan saksi, termasuk di antaranya AS atau Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. (*)

Jaksa Menyidik Kasus di AJB Bumiputera

Demutualisasi bisa menjadi jalan keluar sengkaret AJB

Ferrika Sari, Maizal Walfajri, Abdul Basith

JAKARTA. Kasus korupsi di perusahaan asuransi kembali terungkap. Dugaan korupsi melanda AJB Bumiputera 1912 yang melibatkan mantan pejabat perusahaan.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menahan empat orang. Yakni mantan Direktur Teknik dan Aktuaria AJB (2013) Mohammad Irsyad, mantan Kepala Divisi Syariah AJB (2011), Yon Maryono, mantan *Chief Marketing Officer* (2013) Agusti Hendro, dan Kepala Bagian Aktuaria Hendro Subagio.

Kasi Intel Kejari Jaksel Sri Odit Megoondo menjelaskan, perkara ini ahun 2013. Saat itu, direksi memberikan persetujuan terhadap biaya apresiasi agen senilai Rp 8,47 miliar ke pegawai yang merupakan tim negosiasi dengan melibatkan dua orang agen. "Seolah biaya untuk para agen sebagai keberhasilan *switching* atau pertukaran Produk Kesejahteraan Karyawan (PPK) dengan produk Mitra Save di asuransi kumpulan PT BSRE di Bumiputera," jelas Odit, Selasa (26/1).

Salah satu pemegang polis AJB Bumiputera, Jaka Irwanta menyatakan, penangkapan manajemen bagian kecil *fraud* di AJB. "Bumiputera itu ibarat rumah yang kerampokan. Jadi harus diusut siapa pelaku perampok itu," ujar Jaka.

Sampai saat ini belum ada kejelasan penyelesaian dan pembayaran klaim. "Satu penyelesaian dengan mengundang investor masuk, sepanjang ditetapkan sidang luar biasa untuk mengimplementasikan Pasal 38 Anggaran Dasar. Yakni memilih opsi melanjutkan operasional AJB melalui demutualisasi," bisik seorang sumber ke KONTAN, akhir pekan lalu.

Deputi Komisiner Humas dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anto Prabowo pekan lalu menjelaskan, pasal 38 bisa meminta Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota RUA mengambil keputusan saat perusahaan merugi.

OJK menerbitkan perintah tertulis 16 April 2020 agar mengimplementasi Pasal 38.

Perintah tertulis juga memberikan kesempatan AJB menyampaikan rencana penyehatan keuangan (RPK) komprehensif dan realistis paling lambat 23 Desember 2020. Sebelumnya Ketua BPA, Nurhasanah mengaku sudah mengajukan RPK. "Tapi OJK tidak menyetujui RPK," kata Nurhasanah.

Anto mengaku, hingga enam kali revisi, OJK belum menyetujui RPK. Alasan OJK, belum

memadai mengatasi permasalahan fundamental. RPK mengandalkan kekuatan internal berupa pemasaran melalui saluran distribusi agensi dengan asumsi yang tidak dapat diandalkan. RPK BPA juga merencanakan penjualan aset untuk menutup likuiditas jangka pendek. "Namun tak menguraikan upaya menutup gap aset dan kewajiban jangka panjang," tegas Anto, Kamis (21/1).

Sengkaret di Perusahaan Keuangan

Kasus	Pangkal Persoalan	Perkembangan
Jiwasraya	Berawal kasus gagal bayar polis JS Saving Plan. Kejaksaan menyidik soal kesalahan pengelolaan investasi. Kerugian negara disebut Rp 16,81 triliun	Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman pidana dan denda ke enam terpidana
AJB Bumiputera	Masalah likuiditas perusahaan yang terkatung-katung. Hingga akhirnya ada kewajiban klaim ke nasabah yang nilainya lebih dari Rp 9,6 triliun	Nasabah belum bisa mendapatkan klaim dan masih menunggu pembayaran dari manajemen
Asabri	Jaksa dan BPK menyoroti pengelolaan investasi yang dilakukan Asabri. Ada potensi dan dugaan kerugian negara mencapai Rp 16 triliun	Kejaksaan dan Polisi menyidik kasus Asabri. Belum ada nama tersangka
BP Jamsostek	Jaksa menyoroti pengelolaan investasi yang dilakukan BP Jamsostek yang disebutkan ada potensi kerugian negara. BPK sudah mengaudit laporan dan transaksi keuangan	Kejaksaan menyidik kasus dan memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini

Sumber: Riset KONTAN

Tak Berkaitan Jiwasraya

JAKSA Agung ST Burhanuddin menyebut kasus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) berdiri sendiri. Penyelidikan dilakukan terhadap BP Jamsostek berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Burhanuddin bilang kasus tersebut tak berkaitan dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebelumnya.

"Kasus BP Jamsostek berdiri sendiri dan masih dalam tahap penyidikan awal," ujar Burhanuddin saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (26/1).

Oleh karena itu, penentuan tersangka terkait kasus tersebut masih belum dilakukan. Meski begitu telah terdapat sejumlah orang yang dimintai kesaksian. "Masih tahapan penyidikan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 orang," terang Burhanuddin.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa enam orang sebagai saksi yang terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi BP Jamsostek. ■

Pelaku ASABRI dan Jiwasraya Sama

Kejakung mulai memeriksa sejumlah orang dekat Benny Tjokro.

■ NAWIR ARSYAD AKBAR,
BAMBANG NOROYONO

JAKARTA — Kejaksaan Agung mengkeklaim telah mengantongi tujuh nama tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana Investasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) periode 2012-2019. Hal itu disampaikan Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Selasa (26/1).

"Sudah tujuh orang calon tersangka dan masih bisa berkembang lagi karena sedang dilakukan pendalaman," ujar Burhanuddin, kemarin. Dari tujuh nama tersebut, dua di antaranya adalah orang yang sama dalam kasus Jiwasraya.

"Pelaku ASABRI dengan Jiwasraya itu memang sama. Ada tujuh calon (tersangka), tapi yang dua antara asuransi Jiwasraya dan ASABRI sama," ujar Burhanuddin. Namun, dia masih enggan mengungkapkan siapa nama-nama calon tersangka. "Belum bisa disebutkan nama-namanya."

Burhanuddin mengungkapkan, dugaan kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 22 triliun. Ia mengacu pada hasil perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Jadi, hasil perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan—Red) itu Rp 17 triliun. Tapi, kami menggunakan BPK, Rp 22 sekian triliun," ujar dia.

Ia menjelaskan, ada 18 orang saksi telah diperiksa dalam kasus tersebut. Kejaksaan juga sudah menyita aset para tersangka sebesar Rp 18 triliun. Selanjutnya, pihaknya akan terus menyelidiki aset-aset tersebut. "Asetnya masih ada, yang kemarin sudah kami sita itu sekitar Rp 18 triliun. Itu masih ada sehingga kami akan lacak terus," ujar Burhanuddin.

Salah satu nama terpidana kasus Jiwasraya yang juga disebut terkait kasus ASABRI adalah Benny Tjokro. Ia telah divonis penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya yang merugikan negara mencapai Rp 16,8 triliun. Terpidana lain dalam kasus Jiwasraya yang berasal dari pengusaha adalah Heru Hidayat dan Joko Hartono Trita.

Nama Benny Tjokro kembali mencuat dalam kasus ASABRI karena pernah ada pengakuan dari direktur utama (dirut) ASABRI periode 2009-2016 Adam Rachmat Damiri (ARD).

Purnawirawan mayor jenderal (mayjen) itu mengatakan, pernah ada keputusan direksi ASABRI 2014 untuk menanamkan modal asuransi para pensiunan tentara dan polisi itu ke grup PT Hanson Internasional. Perusahaan dengan kode emiten MYRX tersebut adalah milik Benny Tjokro, salah satu perusahaan swasta pembobol Jiwasraya.

Jampidsus Ali Mukartono sebelumnya juga mengatakan, tim penyidikannya akan kembali memeriksa Benny Tjokro dalam kasus ASABRI. "Kan pernah disebut Pak JA (Jaksa Agung Burhanuddin—Red) sebagian tersangkanya, kemungkinan sama (seperti Jiwasraya). Disebut-sebut Hanson, ya, berarti pemiliknya. Kita periksa nantinya," ujar Ali.

Pada Senin (25/1), tiga karyawan dan satu orang dekat Benny Tjokro Saputro diperiksa tim penyidikan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejaksaan) Leonard Ebenezer Simanjuntak menerangkan, salah satu di antara empat orang tersebut adalah J, karyawan di PT Bumi Nusa Jaya Abadi yang diketahui juga merupakan pegawai Benny Tjokro.



RAPAT KERJA Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).

pakan pegawai Benny Tjokro.

Kemudian, RM diketahui sebagai admin keuangan pada perusahaan milik Benny Tjokro tersebut. Lalu, JI yang merupakan sekretaris Benny Tjokro dan SJS sebagai pengusaha. Empat orang terduga tersebut, menurut Ebenezer, masih berstatus sebagai saksi.

Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, mendorong Kejaksaan untuk menaruh perhatian lebih pada salah satu kasus yang paling merugikan negara tersebut. "ASABRI ini diekspos karena ini kasus dahsyat abad ini, kasus korupsi paling dahsyat abad 21 ini. Saya dukung penuh," ujar Benny dalam rapat tersebut.

Menurut dia, masyarakat saat ini menunggu kerja Kejaksaan untuk membongkar kasus ASABRI, termasuk mengungkap tuntas siapa-siapa yang terlibat dalam kasus itu. Ia pun meminta Kejaksaan transparan. "Dalam penanganan kasus ini, semua (akan) tahu proses ini berjalan adil atau tidak adil, diskriminatif atau tidak, ada yang dilindungi atau ada yang tidak dilindungi," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir mengatakan, pihaknya sudah membentuk panitia kerja (panja) penanganan hukum. Salah satu tugasnya adalah untuk mendalami kasus ASABRI. ■ ed: iham tirta

'Kalau Jaksa Agung, Saya Sudah Mundur, Pak'

■ NAWIR ARSYAD AKBAR

Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin mendapat cecaran saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (26/1). Anggota Komisi III, Supriansa, mengaku kecewa kepada jaksa yang menuntut Pinangki Sirna Malasari dengan penjara 4 tahun dan denda Rp 500 juta. Padahal, mantan pejabat di Kejaksaan itu menerima suap dari buronan kasus korupsi paling dicari, Djoko Soegiarto Tjandra.

"Saya melihat belum profesional Kejaksaan Agung (Kejakung) selama ini yang saya banggakan, ternyata juga berbeda dari harapan kalau saya bandingkan tuntutan Pinangki yang dituntut empat tahun," ujar Supriansa.

Pinangki, kata dia, seharusnya dituntut lebih berat, apalagi Pinangki terbukti bertemu dengan sang buronan di Malaysia. Ia membandingkan dengan jaksa Uri Tri Gunawan yang dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas kasus suap Rp 6 miliar

pada 2008.

"Ini mempertontonkan bahwa kita tidak profesional dalam menempatkan kasus Uri 2008. Pinangki 2019-2020 semakin hari (seharusnya) semakin tinggi tuntutan, tetapi justru semakin rendah dengan kasus nilai yang sama," ujar dia.

Ia pun menyinggung ST Burhanuddin yang seharusnya mundur dari posisi jaksa agung ketika anak buahnya terungkap menyalahgunakan kewenangannya. "Kalau saya jaksa itu waktu itu Pak, saya mengundurkan diri karena saya tidak bisa membina saya punya anak-anak di bawah, sebagai pertanggungjawaban moral kepada publik," ujar politikus Partai Golkar itu.

JPU sebelumnya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap Pinangki Sirna Malasari. Jaksa menilai, mantan kepala subbagian pemantauan dan evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan itu terbukti atas perkara suap, pencurian

uang, dan pemufakatan jahat.

Skandal Djoko Tjandra terdiri atas tiga kasus yang ditangani berbeda. Tidak hanya Pinangki, kasus itu juga melibatkan dua perwira tinggi kepolisian, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjend Prasetyo Utomo; politikus Nasdem Andi Irfan Jaya; pengusaha Tommy Sumardi; dan pengacara Anita Kolopaking.

Namun, tuntutan untuk para terdakwa dari tiga kasus tersebut kurang dari lima tahun penjara. Andi Irfan dituntut 2,5 tahun, Tommy Sumardi 1,5 tahun, Anita Kolopaking 2 tahun, Prasetyo Utomo 2,5 tahun, dan Djoko Tjandra 2 tahun.

Menjawab cecaran Supriansa, Jaksa Agung Burhanuddin mengkeklaim, tuntutan tersebut sudah terukur. "Kenapa Uri 18 tahun dan Pinangki empat tahun, nanti ada, kami sudah terukur Pak," kata Burhanuddin. Ia menunjuk Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Ali Mukartono yang akan menjelaskan lebih lanjut terkait hal

tersebut. Ali juga berada dalam ruang rapat tersebut.

Namun, hingga rapat tersebut selesai, baik Burhanuddin atau Ali tak menentuskannya lebih lanjut. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti tuntutan ringan kepada para tersangka tersebut, terutama terhadap Pinangki. Menurut ICW, Pinangki layak dituntut hukuman pidana maksimal. "ICW berpandangan semestinya, tuntutan yang layak kepada Pinangki adalah hukuman pidana maksimal, yakni 20 tahun penjara," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Selasa (12/1).

Tuntutan empat tahun untuk tiga dakwaan yang menjerat Pinangki sangatlah ringan. Terlebih, Pinangki dalam perkara pemufakatan jahat berencana menyuap Jaksa Agung Burhanuddin dan mantan ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. "Tuntutan yang dibacakan oleh jaksa terhadap Pinangki sangat ringan, tidak objektif, dan melukai rasa keadilan," ujarnya.

■ ed: iham tirta

10. Generali Indonesia: Likuiditas Perbankan Ikut Tingkatkan Permintaan Asuransi

[Bisnis.com](#) / 26-01-2021

FINANSIAL

- HOME
- PERBANKAN
- ASURANSI
- MULTIFINANCE
- PERSONAL FINANCE
- MONETER
- SYARIAH
- FINTECH

Home • Finansial • Asuransi

Generali Indonesia: Likuiditas Perbankan Ikut Tingkatkan Permintaan Asuransi

CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman menilai bahwa *bancassurance* merupakan salah satu kanal pemasaran asuransi yang sangat prospektif. Perkembangan simpanan dan perputaran dana pihak ketiga di perbankan dinilai perlu dicermati sebagai peluang bagi peningkatan permintaan asuransi.

 Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
26 Januari 2021 | 15:41 WIB



Karyawan melintas di dekat logo PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia di Jakarta, Kamis (27/2/2020). *Bisnis* - Hinawan L. Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia menilai bahwa likuiditas perbankan turut meningkatkan permintaan asuransi, khususnya melalui kanal *bancassurance*. Upaya menggaet nasabah perbankan disertai penguatan digitalisasi menjadi strategi jitu Generali pada tahun ini.

CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman menilai bahwa *bancassurance* merupakan salah satu kanal pemasaran asuransi yang sangat prospektif. Perkembangan simpanan dan perputaran dana pihak ketiga di perbankan dinilai perlu dicermati sebagai peluang bagi peningkatan permintaan asuransi.

"Hal ini [peningkatan simpanan] merupakan salah satu indikator kesadaran masyarakat akan risiko finansial selama pandemi. Kesadaran inilah yang akan mendorong peningkatan penetrasi asuransi, termasuk melalui kanal *bancassurance*," ujar Edy kepada *Bisnis*, Selasa (26/1/2021).

Dia pun menyatakan bahwa meningkatnya likuiditas perbankan turut meningkatkan *demand* terhadap asuransi. Saat masyarakat mulai menggerakkan simpanannya menjadi *capital expenditure*, kebutuhan akan proteksi finansial melalui asuransi pun turut meningkat.

Berdasarkan Survei Perbankan Bank Indonesia, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) terus mengalami peningkatan sepanjang 2020. Saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK pada kuartal I/2020 sebesar 11,6 persen, kuartal II/2021 naik menjadi 44 persen, kuartal III/2020 menjadi 80,8 persen, dan kuartal IV/2020 menjadi 88 persen.

Meskipun begitu, SBT pertumbuhan DPK pada kuartal I/2021 diproyeksikan melambat menjadi 17,1 persen. Pertumbuhan DPK deposito yang pada kuartal IV/2020 sebesar 74,2 persen diproyeksikan berbalik pada kuartal I/2021 menjadi -8,2 persen.

Generali Indonesia menyatakan optimistis melihat potensi dan proyeksi bisnis pada 2021 karena aktivitas perekonomian yang terus berjalan. Di satu sisi, pandemi Covid-19 pun berdampak terhadap meningkatnya kesadaran dan minat beli asuransi.

Menurut Edy, pihaknya akan memperkuat berbagai kanal pemasaran untuk menggaet potensi yang ada pada tahun ini, disertai proses digitalisasi. Adanya keharusan physical distancing dalam seluruh proses penjualan maupun layanan pasca penjualan membuat digitalisasi menjadi krusial.

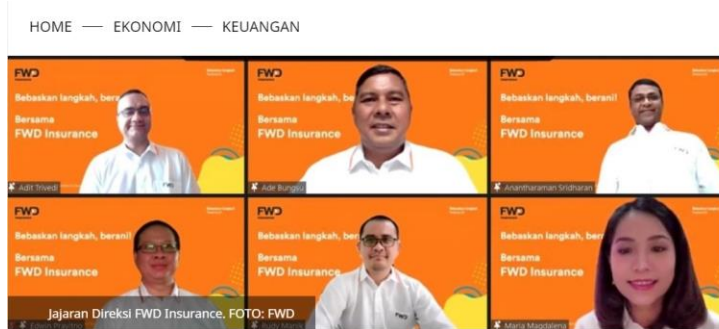
"Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Grup Generali, terdapat fakta bahwa di masa pandemi ini minat beli asuransi dan kesadaran sosial meningkat. Tingginya risiko juga membuat kanal distribusi digital menjadi pilihan bagi masyarakat," ujar Edy.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

[asuransi](#) [generali indonesia](#)

Editor : Ropesta Sitorus

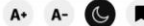
11. FWD Insurance Siap Garap Potensi Pasar Asuransi di Indonesia [Medcom.id](https://www.medcom.id) / 25-01-2021



FWD Insurance Siap Garap Potensi Pasar Asuransi di Indonesia

Ekonomi asuransi jiwa

Angga Bratadharmas • 26 Januari 2021 07:41



Jakarta: **PT FWD Life Indonesia (FWD Life)** dan **PT FWD Insurance Indonesia** resmi menyelesaikan proses penggabungan yang membawa kedua entitas menjadi satu yang selanjutnya disebut PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance). Aksi korporasi ini diharap FWD Insurance bisa memacu bisnis mengingat potensi di Indonesia masih sangat besar.

Pada 2020, FWD Life mengakuisisi dan melakukan rebranding PT Commonwealth Life (PTCL) yang telah berdiri di Indonesia pada 1993. Adapun penggabungan itu dengan tetap berfokus pada teknologi digital sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin paham teknologi.

"Penggabungan ini merupakan bukti keyakinan yang kuat terhadap potensi pasar asuransi Indonesia dalam jangka panjang. Kami harap FWD dapat terus meraih kesuksesan bersama dan secara bersamaan berupaya mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi di Indonesia," kata CEO FWD Group Huynh Thanh Phong, dalam konferensi pers, Senin, 25 Januari 2021.

Direktur Utama FWD Insurance Anantharaman Sridharan menambahkan dengan gabungan kekuatan yaitu pendekatan dan didukung oleh teknologi digital serta jaringan layanan yang luas dan basis nasabah yang kuat, FWD siap melayani nasabah dan meningkatkan pengalaman berasuransi mereka.

"Sebagai satu kesatuan, kami akan dengan mudah beradaptasi dalam menghadapi tantangan serta terus berupaya mendobrak stigma lama dan membuat asuransi lebih sederhana dengan proses yang lebih cepat dan mudah. Kami berkomitmen untuk terus membuat asuransi lebih mudah diakses bagi semua masyarakat Indonesia," klaim Anantharaman.

Anantharaman menambahkan fokus bisnis usai penggabungan yakni bagaimana mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah, mengembangkan produk yang memberikan proteksi sesuai kebutuhan nasabah, dan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga jauh lebih paham tentang pengelolaan keuangan.

"Kalau bicara angka (target bisnis usai penggabungan) adalah satu hal. Tapi penting juga bicara mengenai bagaimana kepuasan nasabah. Bagaimana kalau angkanya (target bisnis) tercapai tapi kemudian kepuasan nasabah terbengkalai. Jadi kita melakukan strategi yang berfokus kepada hal-hal yang meningkatkan kepuasan nasabah terhadap pengalaman berasuransi," tutupnya.

(ABD)

12. FWD Group suntik modal dalam bentuk beli saham BRI life, ini kata BRI [Kontan.co.id](https://kontan.co.id) / 26-01-2021

KEUANGAN / ASURANSI

FWD Group suntik modal dalam bentuk beli saham BRI life, ini kata BRI

Selasa, 26 Januari 2021 / 09:44 WIB



ILUSTRASI. Perayaan ulang tahun ke-33 BRI Life.

Reporter: **Maizal Walfajri** | Editor: **Noverius Laoli**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. FWD Group terus memperluas bisnis asuransi jiwa di Indonesia. Pasca mengakuisisi PT Commonwealth Life lewat PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance), FWD Group juga bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI.

Kerja sama ini dilakukan dengan melakukan menandatangani *conditional share subscription agreement* (CSSA) untuk menyuntikkan modal dalam bentuk saham baru ke BRI Life pada Juni 2020 lalu.

Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto aksi itu masih pada tahap persetujuan OJK IKNB untuk perubahan struktur pemegang saham dan *fit and proper* pemegang saham baru BRI Life.

Ia bilang FWD Group sangat unggul dalam bidang teknologi dan establish di berbagai negara. Juga memahami best practice internasional di bidang asuransi. Sehingga strategic partner international (FWD) ini, BRI berharap akan membawa expertise dan terjadi transfer of knowledge ke BRI Life.

Disamping itu, BRI ingin dapat mengakselerasi bisnis BRI Life terutama pada tiga aspek. Mulai dari people (Sumber daya manusia), product (produk), dan process (proses bisnis).

"Ke depan, BRI akan menjaga kepemilikan saham BRI Life minimal 51% di luar Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI," ujar Aestika kepada [Kontan.co.id](https://kontan.co.id) pada Senin (25/1).

Berdasarkan laporan keuangan BBRI kuartal ketiga, bank pelat merah ini memiliki 91,001% saham BRI Life. Adapun total aset BRI Life pada 30 September 2020 mencapai Rp12,03 triliun. Total pendapatan premi untuk periode sembilan bulan pertama 2020 mencapai Rp 4,43 triliun.

Aestika melanjutkan, arahan BRI terhadap bisnis BRI Life diantaranya melakukan perbaikan dari sisi people, product, dan process termasuk digitalisasi, sehingga meningkatkan competitiveness BRI Life. Selain itu, juga meningkatkan penetrasi pasar non-captive.

Asal tahu saja, setelah FWD Group telah merebranding Commonwealth Life menjadi FWD Life Indonesia. Kemudian, FWD Life Indonesia digabungkan dengan PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance).

Hasil penggabungan yang berada dibawah naungan FWD Insurance akan terus melakukan penetrasi kepada pasar asuransi jiwa Indonesia.

Anantharaman Sridharan, Direktur Utama FWD Insurance bilang penggabungan ini akan menggunakan pendekatan yang lebih segar dan didukung oleh teknologi digital. Juga ditopang oleh jaringan layanan yang luas dan basis nasabah yang kuat.

"(Target) angka satu lah, Tapi kepuasan nasabah menjadi sangat penting. Terdapat tiga strategi, product proposition artinya bagaimana kami fokus mengembangkan produk yang memberikan proteksi ke nasabah dan tingkatkan literasinya," ujar Anantha dalam konferensi secara virtual pada Senin (25/1).

Kedua, inisiatif digital, FWD Insurance akan memanfaatkan digitalisasi dalam meningkatkan pengalaman nasabah. Ketiga mengoptimalkan jalur distribusi produk kepada nasabah melalui bantuan digital sehingga ameningkatkan layanan.

Melalui penggabungan ini, maka semua polis FWD Life dan FWD Insurance beserta syarat, ketentuan, dan manfaatnya tetap sama. Nasabah dapat terus mengakses produk dan layanan perusahaan melalui saluran layanan pilihan mereka. Beberapa nama produk akan berubah mengikuti perubahan nama perusahaan.

Tag

BRI Life Bank BRI Bri Luncurkan T Bank asuransi jiwa

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

13. Beri Pengalaman Lebih Nasabah dengan Teknologi Digital [Jawapos.com](https://www.jawapos.com) / 26-01-2021

Home > Ekonomi > Finance

Beri Pengalaman Lebih Nasabah dengan Teknologi Digital

FINANCE 26 Januari 2021, 05:50:21 WIB



President Director PT FWD Life Indonesia, Anantharaman Sridharan. (FWD Life Indonesia for JawaPos.com)

JawaPos.com – PT FWD Insurance Indonesia telah menuntaskan proses penggabungan usahanya dengan PT FWD Life Indonesia. Kedua entitas tersebut sepakat menggunakan nama PT FWD Insurance Indonesia untuk nama perseroan.

CEO FWD Group Huynh Thanh Phong memastikan, akan memberikan pelayanan lebih baik dengan didukung teknologi digital. "Merger ini merupakan bukti keyakinan kuat kami terhadap potensi pasar asuransi Indonesia dalam jangka panjang," kata Huynh Thanh Phong secara virtual, Senin (25/1).

Dia juga berkomitmen, akan berupaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia tentang industri jasa keuangan. Khususnya, cara pandang tentang asuransi.

Direktur Utama FWD Anantharaman Sridharan menuturkan, melalui teknologi digital dan jaringan layanan yang luas akan menambah pengalaman berasuransi nasabah. Tentunya dengan proses yang lebih ringkas, cepat, dan mudah.

Semua polis FWD Life dan FWD Insurance beserta syarat, ketentuan, dan manfaatnya tetap sama. "Langkah ini sekaligus kampanye everyday heroes. Mendorong setiap orang untuk menjadi pahlawan dalam hidup mereka dan berani membuat keputusan yang berdampak besar," ungkapnya.

Terpisah, perencana keuangan Finansialku, Robby Cristy CFP menuturkan, kebutuhan akan asuransi jiwa maupun kesehatan di tengah pandemi sangat penting. Mengingat, kondisi saat ini, masyarakat dihadapkan dengan persebaran SARS-CoV-2 yang menular dan berbahaya.

Namun, kebanyakan orang memilih menunda membeli karena merasa sehat. "Ibarat masker yang dipakai ketika beraktivitas, sama juga halnya dengan asuransi dalam pengelolaan keuangan pribadi," ucapnya saat dihubungi Jawa Pos.

Artinya, asuransi merupakan salah satu upaya manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan pribadi. Sama pentingnya dengan dana darurat. Meski begitu, dalam membeli asuransi harus menyesuaikan budget dan kondisi keuangan. Selain itu, juga harus tahu asuransi apa yang dibutuhkan. Sehingga tidak mengganggu pos keuangan lainnya.

"Ada istilah value protection, karena kita menghargai setiap rupiah yang keluar harus bisa memberikan benefit terbesar bagi orang tersebut. Begitu pula dalam hal asuransi," terang Robby.

Dia juga mengingatkan, jangan sampai terjebak dalam hasil atau return dari sebuah produk investasi atau asuransi. Sebelum berharap mendapatkan hasil, harus memahami dulu risiko dalam sebuah produk itu.

Seperti produksi asuransi kesehatan atau asuransi lainnya, misalnya. Biasanya, dalam produk asuransi tersebut para agen atau penjual menyampaikan tentang keuntungan yang didapat dari produknya. Diantaranya, ditanggungnya pengobatan untuk sejumlah penyakit kritis.

Maka dari itu, sebaiknya membeli asuransi kesehatan ketika sedang sehat. Sehingga, pada masa tertentu si nasabah terserang penyakit kritis, mereka akan mendapat pelayanan kesehatan dari asuransi.

"Jangan beli produk asuransi ketika sedang mengalami sakit atau sakit kritis. Sebab itu bisa berpotensi tidak diklaim," ungkapnya.

Sebab, biasanya dalam produk tertentu dijelaskan berapa nilai pagu pertanggungan yang diberikan. Jika biaya pengobatan dari penyakit itu melebihi dari pertanggungan, maka jangan kecewa. "Kuncinya pahami dulu risk dan return-nya. Jangan hanya melihat benefit semata. Pahami risikonya dari produk itu sendiri," tandasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Agas Putra Hartanto



asuransi FWD Insurance Indonesia FWD Life Indonesia

14. Tiga Tersangka Kasus Penipuan AJB Bumiputera 1912 Segera Disidang

Mediaindonesia.com / 26-01-2021

Selasa 26 Januari 2021, 17:38 WIB

Tiga Tersangka Kasus Penipuan AJB Bumiputera 1912 Segera Disidang

Tri Subarkah | Politik dan Hukum



ANTARA/Jessica Helena Wuysang

Perwakilan nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 wilayah Kalbar Suryansyah berunjuk rasa di Kantor Bumiputera, Pontianak.

KEJAKSAAN Negeri Jakarta Selatan melakukan pelimpahan tahap II berupa berkas perkara dan tersangka kasus penggelapan di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Ketiga tersangka ialah mantan Chief Marketing Officer Agustiar Hendro, mantan Kepala Bagian Teknik AJB Bumiputera Kanwil Pematang Siantar Muhammad Joni Nasution, serta mantan Kepala Divisi Syariah AJB Bumiputera Yon Maryono.

Tiga tersangka dan berkas perkaranya dilimpahkan Kejari Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Kasi Intel Kejari Jakarta Selatan Sri Odit Megoondo, perkara yang terjadi di perusahaan pelat merah tersebut terjadi pada 2013.

Adapun penggelapan yang terjadi terkait dengan mengalihkan, menjaminkan, dan atau menggunakan tanpa hak kekayaan perusahaan AJB Bumiputera berupa biaya apresiasi agen senilai Rp8 miliar lebih. "Terkait dengan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 periode 2013 dalam pemberian persetujuan biaya apresiasi agen sebesar Rp8.478.564.447 kepada pegawai dan atau karyawan yakni tim negosiasi dan atau pihak lain melalui dua orang agen," kata Odit melalui keterangan tertulis, Selasa (26/1).

Odit menjelaskan biaya apresiasi yang dilakukan seolah-olah diperuntukkan kepada para agen sebagai keberhasilan pelaksanaan switching atau pertukaran Produk Kesejahteraan Karyawan (PKK) dengan Produk Mitra Save pada Askum PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE).

"Perbuatan terhadap dugaan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat 3, 4, dan 5 UU Nomor 2 Tahun 1992 juncto UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jo Pasal 55 KUHP," tandas Odit. (OL-14)



TAGS: # # Korupsi # Kejaksaan Agung # AJB Bumiputera

15. Asuransi Global Mulai Buat Pembatasan, Khawatir Covid-19 Berkepanjangan

[Bisnis.com](#) / 25-01-2021

FINANSIAL

HOME PERBANKAN ASURANSI MULTIFINANCE PERSONAL FINANCE MONETER SYARIAH FINTECH

Home • Finansial • Asuransi

Asuransi Global Mulai Buat Pembatasan, Khawatir Covid-19 Berkepanjangan

Perusahaan asuransi jiwa, termasuk Prudential Financial Inc dan Aviva PLC, sekarang memberlakukan masa tunggu sebelum pasien Covid-19, termasuk mereka yang telah pulih, dapat mengajukan pertanggungan, kata eksekutif dan juru bicara. Beberapa juga membatasi cakupan untuk kelompok usia tertentu.



NewsWire - Bisnis.com
25 Januari 2021 | 23:45 WIB



Prudential - Reuters

A⁻ A⁺

Share



Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa global mengambil langkah untuk mengekang pembayaran yang berasal dari pandemi Virus Corona, termasuk konsekuensi kesehatan jangka panjang yang belum sepenuhnya dipahami.

Perusahaan asuransi jiwa, termasuk Prudential Financial Inc dan Aviva PLC, sekarang memberlakukan masa tunggu sebelum pasien Covid-19, termasuk mereka yang telah pulih, dapat mengajukan pertanggungan, kata eksekutif dan juru bicara. Beberapa juga membatasi cakupan untuk kelompok usia tertentu.

Perubahan ini terjadi karena beberapa perusahaan reasuransi meminta perlindungan baru dari perusahaan asuransi jiwa yang mereka hentikan, dan saat industri berupaya memastikan sejauh mana masalah yang disebabkan oleh Covid-19.

Pandemi ini diperkirakan telah menewaskan lebih dari 2,1 juta orang di seluruh dunia dan menginfeksi hampir 100 juta. Beberapa korban menderita konsekuensi jangka panjang termasuk masalah pernapasan yang parah, kerusakan organ, gangguan peredaran darah, dan kelelahan kronis. Tiga minggu setelah pemulihan, 10 persen pasien Covid-19 masih tidak sehat dan hingga lima persen merasa sakit selama berbulan-bulan, menurut para ilmuwan di King's College London.

Pandemi juga telah menyebabkan krisis kesehatan mental bagi mereka yang tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dicintai atau telah diisolasi selama berbulan-bulan, serta memperburuk masalah penyalahgunaan zat bagi orang lain.

Kendati masih terlalu dini untuk mengetahui berapa banyak orang yang akan mengajukan klaim atas kematian, penyakit jangka panjang, atau kecacatan sebagai akibatnya, tetapi perusahaan asuransi khawatir konsekuensinya dapat berlangsung selama beberapa dekade.

"Kami telah berusaha sebagai perusahaan untuk membuat strategi tentang pemodelan ini dan telah membuat kemajuan tetapi jauh dari 'bola kristal' yang mampu memprediksi ini," kata Kepala Direktur Medis Optimum Re Insurance Co. Paulo Bandeira Pinho.

Optimum telah bertemu dengan pelanggan asuransi jiwa, termasuk Prudential Financial, untuk memetakan risiko jangka panjang dan kemungkinan dampak keuangan. Prudential sekarang memberlakukan masa tunggu minimal 30 hari untuk pasien Covid-19 yang pulih.

"Pada akhirnya, banyak implikasi jangka panjang dari pandemi masih belum diketahui," kata Wakil Presiden Operasi Prudential Keith Bexell. "Saat efek jangka panjang menjadi lebih dipahami, pendekatan kami terhadap penjaminan emisi dapat disesuaikan seperlunya."

Sejak April perusahaan asuransi jiwa Inggris LV telah menunda aplikasi dari siapa pun yang didiagnosis dengan Covid-19, mengalami gejala, atau tinggal bersama seseorang yang sakit, menurut kebijakan penjaminan emisi di situsnyanya.

Aviva PLC juga memberlakukan penundaan "singkat" bagi mereka yang menderita Covid-19 atau gejala serupa selama 30 hari terakhir, kata seorang juru bicara.

Perusahaan asuransi jiwa berada dalam bisnis lindung nilai risiko beberapa dekade sebelumnya. Sejak awal pandemi, pelaku industri mengatakan pandemi itu mungkin tidak akan menyebabkan kerugian finansial yang besar, karena tidak ada lonjakan klaim yang terlalu signifikan.

asuransi prudential Covid-19 pandemi corona

Sumber : Antara, Reuters,

Editor : Ropesta Sitorus